

ABSTRAK

PERAN BKKBN PROVINSI LAMPUNG DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB)

Oleh

Mona Sindytia

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ada sebagian kewenangan dalam hal pelaksanaan program keluarga berencana yang sudah diserahkan kepada daerah. Namun demikian masih ada kewenangan yang tetap dilaksanakan oleh BKKBN Provinsi sebagai instansi vertikal.

Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini yakni bagaimanakah peran BKKBN Provinsi Lampung dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan adakah hambatan yang dialami oleh BKKBN Provinsi Lampung dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Setelah data terkumpul, selanjutnya diolah dengan cara seleksi data, klasifikasi data, dan penyusunan data. Analisis yang digunakan adalah analisis secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peran BKKBN Provinsi Lampung dalam pelaksanaan Program KB antara lain terkait pembelian alat kontrasepsi yang masih menggunakan dana APBN dan pembelian sarana-prasarana yang masih menggunakan DAK dari BKKBN Provinsi Lampung untuk keperluan Pelaksanaan Program KB. Hambatan yang dialami oleh BKKBN Provinsi Lampung dalam pelaksanaan Program KB antara lain APBD yang terbatas sehingga pemenuhan alat kontrasepsi masih menggunakan dana APBN dari BKKBN Provinsi Lampung, sarana operasional pelaksanaan Program KB masih menggunakan DAK BKKBN Provinsi Lampung, kurangnya tenaga petugas penyuluhan dan petugas lapangan, pembinaan terhadap kader maupun terhadap akseptor yang sudah mulai berkurang, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya pemakaian alat kontrasepsi berupa Suntikan dan Pil secara jangka panjang terhadap hormon dan organ tubuh perempuan.